

Komunikasi Pembangunan Berbasis Literasi Digital: Kerangka Konseptual Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani dalam Pengembangan Desa Wisata Brongkol, Cangkringan Sleman

Nina Kusumawati^{1*}

¹ Universitas Bina Sarana Informatika

Corresponding Author: Nina.nki@bsi.ac.id

Published: August , 2026

ABSTRACT

Digital transformation has reshaped development communication by expanding access to information and strengthening community participation. However, digital literacy disparities remain a major challenge in rural areas, particularly among women who often face limited access to and productive use of digital technologies. In Indonesia, Women Farmers Groups (Kelompok Wanita Tani—KWT) play a strategic role in supporting food security, local economic empowerment, and community-based tourism development. Nevertheless, most empowerment programs continue to emphasize agricultural production and business capacity while paying insufficient attention to development communication supported by digital literacy. Furthermore, previous studies have generally examined digital literacy, women's empowerment, and rural tourism as separate topics, leaving limited conceptual integration among these perspectives. This conceptual paper aims to develop a development communication framework based on digital literacy to empower Women Farmers Groups in supporting the sustainable development of Brongkol Tourism Village, Sleman Regency. The study adopts a qualitative conceptual approach through an extensive literature review of scholarly articles, academic books, government policy documents, and reports from international organizations. The conceptual synthesis integrates Development Communication Theory, Diffusion of Innovations Theory, Digital Divide Theory, and UNESCO's Digital Literacy Global Framework. The proposed framework positions participatory development communication as the central mechanism for enhancing digital competencies through collaborative learning, knowledge sharing, digital content creation, and strategic use of digital media. Strengthened digital literacy is expected to improve the communication capacity of Women Farmers Groups, expand market access for local products, enhance tourism promotion, and increase women's participation in sustainable rural development. The proposed framework contributes to the literature by integrating development communication, digital literacy, women's empowerment, and community-based tourism into a comprehensive conceptual model that can guide the design of more inclusive and sustainable digital empowerment programs in rural communities.

Keywords: *development communication; digital literacy; Women Farmers Groups; women's empowerment; community-based tourism; digital inclusion*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah cara masyarakat mengakses informasi, membangun jejaring, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan. Dalam perspektif komunikasi pembangunan, teknologi digital tidak hanya berfungsi sebagai media penyebaran informasi, tetapi juga menjadi sarana dialog, kolaborasi, dan pemberdayaan masyarakat yang mendorong perubahan sosial secara partisipatif (Servaes, 2020; Melkote & Steeves, 2015). Pendekatan komunikasi pembangunan kontemporer menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan, berbagi pengetahuan, serta membangun solusi bersama terhadap berbagai persoalan pembangunan (Mefalopulos, 2008; Tufte & Mefalopulos, 2009). Oleh karena itu, literasi digital tidak lagi dipahami sekadar kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi telah berkembang menjadi kompetensi strategis yang menentukan kemampuan individu maupun

komunitas dalam berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi (UNESCO, 2018).

Perkembangan teknologi digital juga membuka peluang baru bagi masyarakat pedesaan untuk memperluas akses informasi, meningkatkan produktivitas ekonomi, dan mengembangkan potensi lokal melalui pemanfaatan media digital. Namun, manfaat tersebut belum dirasakan secara merata karena masih terdapat kesenjangan digital (*digital divide*) yang dipengaruhi oleh perbedaan akses teknologi, keterampilan digital, serta kemampuan memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan teknologi informasi (van Dijk, 2020; Helsper, 2021). Robinson et al. (2020) menjelaskan bahwa kesenjangan digital tidak lagi hanya berkaitan dengan kepemilikan perangkat digital, tetapi juga mencakup kemampuan individu dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.

Kesenjangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan perangkat digital (*first-level digital divide*), tetapi juga mencakup perbedaan kemampuan mengakses informasi, mengevaluasi kredibilitas informasi, memproduksi konten digital, serta memperoleh manfaat sosial dan ekonomi dari penggunaan teknologi (*second dan third-level digital divide*) (van Dijk, 2020). Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat pedesaan belum mampu memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana peningkatan kesejahteraan.

Dalam konteks pembangunan pedesaan, literasi digital menjadi kompetensi strategis yang memungkinkan masyarakat mengakses, mengevaluasi, menciptakan, dan mendistribusikan informasi secara efektif, kritis, dan bertanggung jawab (UNESCO, 2018). Kerangka Digital Competence Framework for Citizens (DigComp 2.2) menegaskan bahwa literasi digital mencakup kompetensi pengelolaan informasi, komunikasi digital, produksi konten, keamanan digital, dan pemecahan masalah berbasis teknologi (European Commission, 2022). Oleh karena itu, peningkatan literasi digital tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kapasitas individu, tetapi juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi berbasis digital (UNESCO, 2021).

Perempuan pedesaan merupakan kelompok yang relatif lebih rentan mengalami kesenjangan literasi digital dibandingkan kelompok masyarakat lainnya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perempuan di wilayah pedesaan masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh pelatihan digital, akses terhadap teknologi informasi, serta kesempatan mengembangkan kapasitas kewirausahaan berbasis digital. Padahal, perempuan memiliki peran strategis dalam pembangunan komunitas melalui kegiatan ekonomi produktif, pengelolaan sumber daya lokal, ketahanan pangan keluarga, hingga pelestarian budaya lokal. Penguatan literasi digital bagi perempuan menjadi salah satu prasyarat penting dalam mendukung pencapaian pembangunan yang inklusif serta tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-5 (Kesetaraan Gender), tujuan ke-8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), tujuan ke-9 (Inovasi dan Infrastruktur), serta tujuan ke-11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan).

Kelompok Wanita Tani (KWT) merupakan salah satu bentuk kelembagaan masyarakat yang memiliki kontribusi penting dalam mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan usaha mikro, serta pengelolaan potensi lokal berbasis masyarakat. KWT tidak hanya berperan sebagai kelompok produksi pertanian, tetapi juga menjadi media pembelajaran, kerja sama sosial, dan pemberdayaan perempuan di tingkat desa. Seiring berkembangnya konsep pembangunan berbasis komunitas, peran KWT semakin meluas pada pengembangan ekonomi kreatif, pemasaran produk lokal, hingga pengelolaan desa wisata yang memanfaatkan potensi alam, budaya, dan hasil pertanian sebagai daya tarik wisata.

Salah satu desa yang memiliki potensi tersebut adalah Desa Wisata Brongkol di Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman. Desa ini mengembangkan konsep pariwisata berbasis masyarakat (*community-based tourism*) dengan memanfaatkan potensi pertanian, budaya lokal, edukasi, serta aktivitas ekonomi masyarakat sebagai daya tarik wisata. Keberadaan Kelompok Wanita Tani menjadi salah satu aktor penting dalam mendukung pengembangan desa wisata melalui penyediaan produk olahan pangan lokal, pengelolaan kegiatan edukasi pertanian, serta keterlibatan dalam berbagai aktivitas ekonomi kreatif. Namun demikian, pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung promosi desa wisata, pemasaran produk UMKM, komunikasi dengan wisatawan,

maupun pengembangan jejaring pemasaran masih belum optimal sehingga potensi ekonomi digital belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan pemerintah maupun lembaga pendamping selama ini lebih banyak menitikberatkan pada peningkatan kapasitas produksi, budidaya pertanian, pengolahan hasil pertanian, serta manajemen usaha. Sementara itu, aspek komunikasi pembangunan berbasis literasi digital sebagai strategi pemberdayaan masyarakat belum memperoleh perhatian yang proporsional. Padahal, kemampuan memproduksi konten digital, mengelola media sosial, membangun komunikasi pemasaran digital, dan memanfaatkan platform digital merupakan kompetensi yang semakin penting dalam meningkatkan daya saing desa wisata dan produk lokal di era ekonomi digital.

Di sisi lain, hasil kajian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian mengenai literasi digital umumnya masih berfokus pada pengukuran tingkat kompetensi digital individu, adopsi teknologi, atau perilaku penggunaan media digital. Penelitian mengenai pemberdayaan perempuan lebih banyak membahas aspek ekonomi, partisipasi sosial, atau kewirausahaan, sedangkan penelitian desa wisata cenderung menitikberatkan pada pengelolaan destinasi, pemasaran pariwisata, dan pembangunan berkelanjutan. Kajian yang mengintegrasikan komunikasi pembangunan, literasi digital, pemberdayaan perempuan, dan pengembangan desa wisata dalam satu kerangka konseptual masih relatif terbatas. Padahal, integrasi keempat konsep tersebut diperlukan untuk menjelaskan bagaimana komunikasi pembangunan dapat menjadi mekanisme yang memperkuat kapasitas digital masyarakat sekaligus meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa wisata.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu kerangka konseptual yang mampu menjelaskan hubungan antara komunikasi pembangunan, literasi digital, pemberdayaan Kelompok Wanita Tani, dan pengembangan desa wisata berbasis masyarakat. Artikel ini bertujuan mengembangkan kerangka konseptual komunikasi pembangunan berbasis literasi digital sebagai strategi pemberdayaan Kelompok Wanita Tani dalam pengembangan Desa Wisata Brongkol, Cangkringan, Sleman. Kerangka konseptual ini mengintegrasikan teori Komunikasi Pembangunan (Servaes, 2020), Teori Difusi Inovasi (Rogers, 2003), Digital Divide Theory (van Dijk, 2020), dan Digital Literacy Global Framework UNESCO (2018). Integrasi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian komunikasi pembangunan sekaligus menjadi rujukan praktis bagi penyusunan program pemberdayaan digital yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan di kawasan pedesaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis conceptual paper atau artikel konseptual. Pendekatan ini bertujuan mengembangkan suatu kerangka konseptual yang mengintegrasikan teori dan hasil penelitian terdahulu untuk menjelaskan hubungan antara komunikasi pembangunan, literasi digital, pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT), dan pengembangan desa wisata berbasis masyarakat. Berbeda dengan penelitian empiris yang mengumpulkan data lapangan, artikel konseptual berfokus pada sintesis teori dan pengembangan model konseptual berdasarkan kajian literatur yang sistematis (Jaakkola, 2020).

Sumber data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Literatur yang dianalisis meliputi artikel ilmiah bereputasi yang terindeks Scopus dan SINTA, buku akademik, dokumen kebijakan pemerintah, serta laporan lembaga internasional seperti UNESCO, Food and Agriculture Organization (FAO), World Bank, dan United Nations. Pemilihan literatur dilakukan berdasarkan relevansi dengan topik penelitian, yaitu komunikasi pembangunan, literasi digital, pemberdayaan perempuan, digital divide, community-based tourism, dan pengembangan desa wisata. Literatur yang digunakan terutama berasal dari publikasi tahun 2020–2026, sedangkan beberapa referensi klasik tetap digunakan sebagai landasan teori, seperti Teori Difusi Inovasi (Rogers, 2003) dan Digital Divide Theory (van Dijk, 2020).

Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, peneliti mengidentifikasi konsep-konsep utama yang berkaitan dengan komunikasi pembangunan, literasi digital, pemberdayaan

perempuan, dan pengembangan desa wisata. Kedua, dilakukan telaah kritis terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, serta kesenjangan penelitian (research gap). Ketiga, konsep-konsep yang telah dianalisis diintegrasikan ke dalam suatu kerangka konseptual menggunakan pendekatan sintesis konseptual (conceptual synthesis), sehingga diperoleh model hubungan antarvariabel yang mampu menjelaskan bagaimana komunikasi pembangunan berbasis literasi digital dapat memperkuat kapasitas Kelompok Wanita Tani dalam mendukung pengembangan Desa Wisata Brongkol.

Pengembangan kerangka konseptual dalam penelitian ini mengacu pada empat perspektif teori utama, yaitu Teori Komunikasi Pembangunan yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan (Servaes, 2020), Teori Difusi Inovasi yang menjelaskan proses adopsi inovasi melalui komunikasi (Rogers, 2003), Digital Divide Theory yang menjelaskan kesenjangan akses, keterampilan, dan manfaat penggunaan teknologi digital (van Dijk, 2020), serta Digital Literacy Global Framework yang menekankan kompetensi digital sebagai prasyarat partisipasi masyarakat dalam era digital (UNESCO, 2018). Integrasi keempat perspektif tersebut menjadi dasar dalam penyusunan model konseptual yang menghubungkan peningkatan literasi digital, penguatan kapasitas komunikasi, produksi konten digital, promosi desa wisata, dan pemberdayaan ekonomi perempuan.

Untuk meningkatkan kredibilitas kajian, peneliti menerapkan triangulasi sumber pustaka, yaitu membandingkan berbagai teori, hasil penelitian empiris, serta dokumen kebijakan dari berbagai institusi akademik dan internasional. Pendekatan ini bertujuan memperoleh sintesis konseptual yang komprehensif, valid, dan relevan sebagai dasar pengembangan model komunikasi pembangunan berbasis literasi digital bagi Kelompok Wanita Tani dalam pengembangan desa wisata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi Pembangunan sebagai Landasan Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani

Hasil kajian menunjukkan bahwa komunikasi pembangunan telah mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan yang bersifat linear dan berorientasi pada penyampaian informasi (top-down communication) menuju pendekatan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Paradigma ini menekankan bahwa pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan transfer teknologi atau informasi, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, berbagi pengetahuan, serta membangun kolaborasi antarpemangku kepentingan (Servaes, 2020). Menurut Melkote dan Steeves (2015), keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh penyebaran informasi, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat membangun kapasitas kolektif melalui proses komunikasi yang inklusif. Sejalan dengan itu, Mefalopulos (2008) menegaskan bahwa komunikasi pembangunan merupakan proses pembelajaran sosial yang memungkinkan masyarakat mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, dan berpartisipasi dalam setiap tahapan pembangunan.

Dalam konteks Desa Wisata Brongkol, komunikasi pembangunan menjadi instrumen penting untuk memperkuat kapasitas Kelompok Wanita Tani (KWT) sebagai agen perubahan di tingkat lokal. KWT tidak hanya berfungsi sebagai kelompok produksi pertanian, tetapi juga sebagai wadah pembelajaran sosial, pengembangan kewirausahaan, dan pelestarian budaya lokal. Melalui komunikasi pembangunan yang dialogis, anggota KWT memperoleh kesempatan untuk bertukar pengalaman, mengidentifikasi kebutuhan komunitas, serta mengembangkan solusi bersama dalam mengelola potensi desa wisata. Pendekatan ini sejalan dengan konsep participatory communication, yang menekankan bahwa keberhasilan pembangunan bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan (Servaes, 2020).

Namun demikian, efektivitas komunikasi pembangunan pada era digital tidak lagi hanya ditentukan oleh interaksi tatap muka. Perkembangan teknologi informasi telah memperluas ruang komunikasi melalui media digital yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi, membangun jejaring, dan mempromosikan potensi lokal secara lebih luas. Oleh karena itu, komunikasi pembangunan perlu diintegrasikan dengan penguatan literasi digital agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi sebagai sarana pemberdayaan.

2. Literasi Digital sebagai Modal Pemberdayaan Perempuan

Literasi digital merupakan kompetensi yang memungkinkan individu mengakses, memahami, mengevaluasi, menciptakan, dan membagikan informasi melalui media digital secara efektif, kritis, dan bertanggung jawab (UNESCO, 2018). Dalam perspektif komunikasi pembangunan, literasi digital tidak hanya dipahami sebagai keterampilan teknis menggunakan perangkat digital, tetapi juga sebagai kemampuan sosial yang mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa perempuan pedesaan masih menghadapi berbagai hambatan dalam penguasaan kompetensi digital, antara lain keterbatasan akses internet, rendahnya kesempatan mengikuti pelatihan, kurangnya pendampingan, serta rendahnya kepercayaan diri dalam memanfaatkan teknologi digital (FAO, 2023). Kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar anggota KWT masih menggunakan media digital secara terbatas untuk komunikasi personal dan belum memanfaatkannya secara optimal sebagai media pemasaran produk, promosi wisata, maupun pengembangan usaha berbasis digital.

UNESCO (2018) mengelompokkan literasi digital ke dalam beberapa kompetensi utama, yaitu:

- a. kemampuan mengakses informasi digital;
- b. kemampuan mengelola dan mengevaluasi informasi;
- c. kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi secara digital;
- d. kemampuan menciptakan konten digital;
- e. kemampuan menjaga keamanan digital; dan
- f. kemampuan memecahkan masalah melalui teknologi.

Kompetensi tersebut menjadi fondasi bagi peningkatan kapasitas anggota KWT dalam menghadapi transformasi digital. Dengan meningkatnya literasi digital, perempuan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga produsen informasi dan pelaku ekonomi digital yang mampu memperluas akses pasar produk lokal.

3. Difusi Inovasi dalam Pengembangan Literasi Digital

Teori Difusi Inovasi menjelaskan bahwa adopsi suatu inovasi dipengaruhi oleh proses komunikasi, karakteristik inovasi, saluran komunikasi, waktu, dan sistem sosial (Rogers, 2003). Dalam konteks pemberdayaan KWT, literasi digital dapat dipandang sebagai inovasi sosial yang memerlukan proses pembelajaran dan pendampingan agar dapat diterima serta diterapkan secara berkelanjutan.

Proses adopsi literasi digital dimulai dari tahap knowledge, yaitu ketika anggota KWT memperoleh informasi mengenai manfaat media digital. Tahap berikutnya adalah persuasion, yaitu munculnya ketertarikan terhadap penggunaan teknologi. Selanjutnya anggota KWT memasuki tahap decision, yaitu memutuskan untuk mencoba media digital dalam aktivitas ekonomi. Pada tahap implementation, teknologi mulai digunakan untuk mempromosikan produk pertanian, kerajinan, maupun aktivitas desa wisata. Akhirnya, pada tahap confirmation, penggunaan teknologi menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari karena terbukti memberikan manfaat ekonomi maupun sosial (Rogers, 2003).

Keberhasilan difusi inovasi sangat dipengaruhi oleh keberadaan agen perubahan (change agents), seperti pemerintah desa, perguruan tinggi, penyuluh pertanian, komunitas digital, maupun pelaku industri pariwisata yang berperan sebagai fasilitator pembelajaran.

4. Digital Divide sebagai Tantangan Pemberdayaan

Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa kesenjangan digital tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap internet, tetapi juga oleh rendahnya kemampuan memanfaatkan teknologi untuk memperoleh manfaat ekonomi dan sosial (van Dijk, 2020).

Van Dijk (2020) membedakan kesenjangan digital menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- a. Access Divide, yaitu kesenjangan kepemilikan perangkat dan akses internet.
- b. Skills Divide, yaitu kesenjangan kompetensi dalam menggunakan teknologi digital.
- c. Outcome Divide, yaitu kesenjangan manfaat ekonomi, sosial, dan pendidikan yang diperoleh dari penggunaan teknologi digital.

Dalam pengembangan Desa Wisata Brongkol, ketiga bentuk kesenjangan tersebut masih berpotensi muncul. Misalnya, sebagian anggota KWT telah memiliki telepon pintar, tetapi belum

memiliki keterampilan memproduksi konten digital atau memanfaatkan media sosial untuk pemasaran produk. Akibatnya, manfaat ekonomi dari teknologi digital belum dapat dirasakan secara optimal.

Helsper (2021) menjelaskan bahwa kesenjangan digital dipengaruhi oleh faktor pendidikan, kondisi ekonomi, usia, gender, serta lingkungan sosial yang menyebabkan kelompok tertentu lebih sulit mengadopsi teknologi digital. Dalam konteks Desa Wisata Brongkol, tantangan tersebut dapat terlihat dari masih terbatasnya kemampuan anggota KWT dalam memproduksi konten digital, mengelola pemasaran berbasis media sosial, maupun memanfaatkan platform digital untuk memperluas pasar produk lokal. Robinson et al. (2020) menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital harus diukur berdasarkan manfaat nyata yang diperoleh masyarakat, bukan hanya pada tingkat penggunaan teknologi.

Dengan demikian, program pemberdayaan tidak cukup hanya menyediakan infrastruktur digital, tetapi juga perlu memperkuat kapasitas digital masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, dan pengembangan jejaring kolaboratif.

5. Kerangka Konseptual Komunikasi Pembangunan Berbasis Literasi Digital

Kelompok Wanita Tani merupakan salah satu bentuk kelembagaan masyarakat yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan, penguatan ekonomi keluarga, dan pengembangan usaha berbasis komunitas. Menurut FAO (2023), perempuan memiliki peran strategis dalam sistem agrifood global, namun masih menghadapi ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya, teknologi, dan informasi. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan melalui penguatan literasi digital menjadi langkah penting untuk meningkatkan kapasitas ekonomi sekaligus memperluas partisipasi mereka dalam pembangunan desa.

Pendekatan ini sejalan dengan Capability Approach yang dikembangkan oleh Sen (1999), yang menekankan bahwa pembangunan harus memperluas kemampuan (capabilities) individu untuk memilih dan menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga. Dalam konteks Desa Wisata Brongkol, peningkatan literasi digital tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis anggota KWT, tetapi juga memperkuat kemampuan mereka dalam mengelola usaha, membangun jejaring, dan mengambil keputusan secara mandiri.

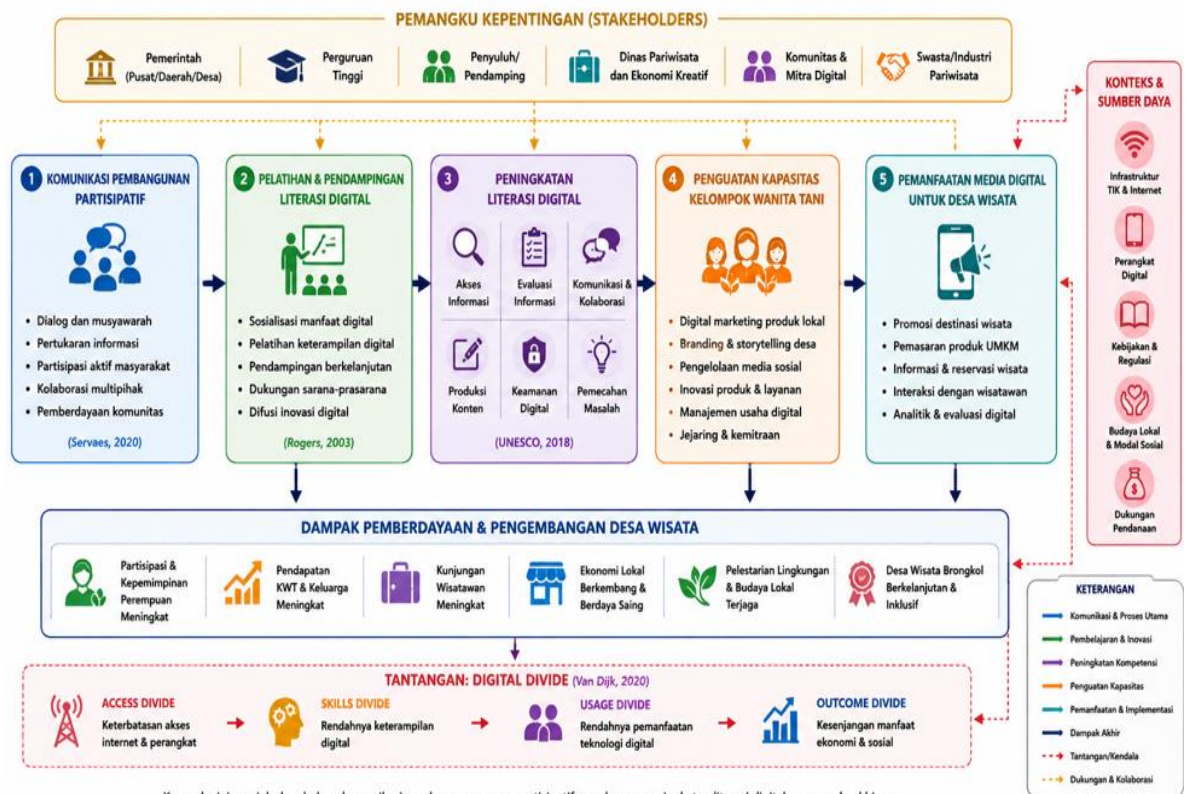
Berdasarkan sintesis teori dan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini menghasilkan suatu kerangka konseptual yang mengintegrasikan komunikasi pembangunan, literasi digital, pemberdayaan perempuan, dan pengembangan desa wisata.

Dalam kerangka tersebut, komunikasi pembangunan berfungsi sebagai pendekatan utama yang memfasilitasi proses pembelajaran partisipatif. Melalui komunikasi yang dialogis, anggota KWT memperoleh akses terhadap pengetahuan, pelatihan, dan pendampingan literasi digital. Penguatan kompetensi digital kemudian meningkatkan kemampuan anggota KWT dalam mengakses informasi, memproduksi konten digital, mengelola media sosial, serta membangun komunikasi pemasaran berbasis digital.

Peningkatan kompetensi digital selanjutnya mendorong promosi Desa Wisata Brongkol yang lebih efektif melalui berbagai platform digital. Konten yang dihasilkan dapat berupa promosi destinasi wisata, edukasi pertanian, produk olahan pangan lokal, aktivitas budaya, maupun cerita mengenai kehidupan masyarakat desa. Aktivitas komunikasi digital tersebut memperluas jangkauan promosi, meningkatkan kunjungan wisatawan, memperkuat pemasaran produk lokal, dan membuka peluang kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Pada akhirnya, proses tersebut berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan ekonomi perempuan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa wisata, serta terwujudnya pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Secara konseptual, hubungan antarvariabel dapat digambarkan sebagai berikut:

KERANGKA KONSEPTUAL

Komunikasi Pembangunan Berbasis Literasi Digital dalam Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani untuk Pengembangan Desa Wisata Brongkol



Kerangka ini menjelaskan bahwa komunikasi pembangunan yang partisipatif mendorong peningkatan literasi digital, yang pada akhirnya memperkuat kapasitas Kelompok Wanita Tani dalam memanfaatkan media digital untuk pemberdayaan ekonomi dan pengembangan Desa Wisata Brongkol secara berkelanjutan.

Proposisi Penelitian

Kerangka konseptual ini menghasilkan enam proposisi penelitian yang menjelaskan hubungan antara komunikasi pembangunan, literasi digital, pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT), dan pengembangan desa wisata.

P1. Pengaruh Komunikasi Pembangunan terhadap Literasi Digital

P1: Komunikasi pembangunan partisipatif berpengaruh positif terhadap peningkatan literasi digital anggota Kelompok Wanita Tani.

Komunikasi pembangunan yang menekankan dialog, partisipasi, dan pembelajaran bersama akan meningkatkan kemampuan anggota KWT dalam mengakses, memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan teknologi digital secara produktif. Semakin tinggi intensitas komunikasi partisipatif, semakin tinggi pula kompetensi literasi digital masyarakat (Servaes, 2020; Mefalopulos, 2008).

P2. Pengaruh Pelatihan Literasi Digital terhadap Kompetensi Digital

P2: Pelatihan dan pendampingan literasi digital berpengaruh positif terhadap peningkatan kompetensi digital anggota Kelompok Wanita Tani.

Pelatihan digital yang dilakukan secara berkelanjutan akan meningkatkan kemampuan anggota KWT dalam mengelola informasi, memproduksi konten digital, berkomunikasi melalui media digital, serta menjaga keamanan digital. Proses ini merupakan bentuk adopsi inovasi sebagaimana dijelaskan dalam Teori Difusi Inovasi (Rogers, 2003; UNESCO, 2018).

P3. Pengaruh Literasi Digital terhadap Kapasitas Kelompok Wanita Tani

P3: Peningkatan literasi digital berpengaruh positif terhadap penguatan kapasitas Kelompok Wanita Tani.

Literasi digital yang baik memungkinkan anggota KWT mengembangkan kemampuan pemasaran digital, membangun branding produk lokal, mengelola media sosial, menciptakan inovasi produk, serta memperluas jejaring kemitraan. Dengan demikian, literasi digital menjadi modal utama dalam meningkatkan kapasitas organisasi (UNESCO, 2018; European Commission, 2022).

P4. Pengaruh Kapasitas Kelompok Wanita Tani terhadap Pemanfaatan Media Digital

P4: Penguatan kapasitas Kelompok Wanita Tani berpengaruh positif terhadap optimalisasi pemanfaatan media digital dalam pengembangan desa wisata.

Semakin tinggi kapasitas organisasi KWT, semakin efektif pemanfaatan media digital untuk promosi destinasi wisata, pemasaran produk UMKM, penyediaan informasi wisata, dan interaksi dengan wisatawan. Kapasitas organisasi menjadi faktor penting dalam keberhasilan transformasi digital di tingkat komunitas (Heeks, 2018; Kotler et al., 2021).

P5. Pengaruh Pemanfaatan Media Digital terhadap Pemberdayaan dan Pengembangan Desa Wisata

P5: Pemanfaatan media digital berpengaruh positif terhadap pemberdayaan perempuan dan pengembangan Desa Wisata Brongkol yang berkelanjutan.

Pemanfaatan media digital akan memperluas jangkauan promosi, meningkatkan kunjungan wisatawan, memperkuat pemasaran produk lokal, meningkatkan pendapatan anggota KWT, serta mendorong partisipasi perempuan dalam pembangunan desa wisata. Kondisi tersebut berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan (UNWTO, 2021; FAO, 2023).

P6. Peran Digital Divide

P6: Digital divide memengaruhi efektivitas hubungan antara literasi digital dan pemanfaatan media digital dalam pemberdayaan Kelompok Wanita Tani.

Kesenjangan akses internet, keterampilan digital, intensitas penggunaan teknologi, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dapat memperkuat atau melemahkan keberhasilan implementasi komunikasi pembangunan berbasis literasi digital. Semakin rendah tingkat kesenjangan digital, semakin optimal pemanfaatan teknologi dalam mendukung pemberdayaan masyarakat (van Dijk, 2020; Helsper, 2021).

Kerangka konseptual ini menjelaskan bahwa komunikasi pembangunan partisipatif merupakan titik awal dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pendekatan komunikasi yang menekankan dialog, partisipasi, kolaborasi, dan pemberdayaan memungkinkan masyarakat, khususnya anggota Kelompok Wanita Tani (KWT), terlibat secara aktif dalam mengidentifikasi kebutuhan, memecahkan masalah, dan merancang strategi pengembangan desa wisata. Menurut Servaes (2020), komunikasi pembangunan tidak lagi berorientasi pada penyampaian informasi secara satu arah (*top-down*), tetapi menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pembangunan melalui komunikasi yang bersifat dialogis dan partisipatif.

Proses komunikasi pembangunan kemudian didukung oleh berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yang terdiri atas pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, penyuluh pertanian, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, komunitas digital, serta sektor swasta. Keterlibatan multipihak ini berfungsi sebagai fasilitator dalam menyediakan pelatihan, pendampingan, sumber daya, serta akses terhadap teknologi digital. Kolaborasi tersebut sejalan dengan konsep *quadruple helix*, yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan berbasis inovasi.

Tahapan berikutnya adalah pelatihan dan pendampingan literasi digital yang berfungsi sebagai media transfer pengetahuan dan proses difusi inovasi. Berdasarkan Teori Difusi Inovasi (Rogers, 2003), adopsi inovasi digital terjadi melalui proses pengenalan, pembelajaran, implementasi, hingga konfirmasi penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pelatihan tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga membangun kepercayaan diri anggota KWT dalam memanfaatkan teknologi digital untuk kegiatan produktif.

Pelatihan tersebut menghasilkan peningkatan kompetensi literasi digital yang mengacu pada *Digital Literacy Global Framework* UNESCO (2018). Kompetensi tersebut meliputi kemampuan mengakses informasi digital, mengevaluasi kualitas informasi, berkomunikasi dan berkolaborasi secara digital, memproduksi konten digital, menjaga keamanan digital, serta memanfaatkan teknologi untuk memecahkan berbagai persoalan. Peningkatan kompetensi ini menjadi modal utama dalam menghadapi transformasi digital yang semakin berkembang di sektor pertanian dan pariwisata.

Meningkatnya literasi digital selanjutnya memperkuat kapasitas Kelompok Wanita Tani dalam mengembangkan berbagai aktivitas ekonomi berbasis digital. Kapasitas tersebut diwujudkan melalui kemampuan melakukan pemasaran digital (*digital marketing*), membangun identitas dan citra (*branding*)

produk lokal, mengembangkan *storytelling* desa wisata, mengelola media sosial, melakukan inovasi produk dan layanan, serta membangun jejaring kemitraan dengan berbagai pihak. Dengan demikian, literasi digital tidak hanya meningkatkan keterampilan individu, tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan KWT sebagai organisasi masyarakat yang mendukung pembangunan desa.

Penguatan kapasitas tersebut kemudian diimplementasikan melalui pemanfaatan media digital untuk pengembangan desa wisata. Pada tahap ini, media digital dimanfaatkan sebagai sarana promosi destinasi wisata, pemasaran produk UMKM, penyebaran informasi mengenai paket wisata, interaksi dengan wisatawan, hingga evaluasi efektivitas promosi melalui analitik media sosial. Pemanfaatan media digital memperluas jangkauan promosi sehingga potensi desa tidak lagi terbatas pada pasar lokal, tetapi dapat dikenal oleh wisatawan nasional maupun internasional.

Implementasi media digital tersebut menghasilkan berbagai dampak pemberdayaan masyarakat, antara lain meningkatnya partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam pembangunan desa, meningkatnya pendapatan anggota KWT dan keluarga, bertambahnya jumlah kunjungan wisatawan, berkembangnya ekonomi lokal, terjaganya kelestarian lingkungan dan budaya lokal, serta terwujudnya Desa Wisata Brongkol yang berkelanjutan dan inklusif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa literasi digital tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat aspek sosial, budaya, dan kelembagaan masyarakat.

Model konseptual ini juga menunjukkan adanya faktor kontekstual yang memengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, perangkat digital, kebijakan pemerintah, kondisi sosial budaya masyarakat, serta dukungan pendanaan. Faktor-faktor tersebut merupakan prasyarat penting agar proses transformasi digital dapat berjalan secara optimal.

Di sisi lain, model ini mengintegrasikan Digital Divide Theory (van Dijk, 2020) sebagai faktor yang berpotensi menghambat proses pemberdayaan pada setiap tahapan. Kesenjangan digital meliputi empat dimensi, yaitu access divide (keterbatasan akses internet dan perangkat digital), skills divide (rendahnya keterampilan digital), usage divide (rendahnya intensitas dan kualitas pemanfaatan teknologi), dan outcome divide (ketimpangan manfaat ekonomi dan sosial yang diperoleh dari penggunaan teknologi digital). Oleh karena itu, komunikasi pembangunan tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai strategi untuk mengurangi kesenjangan digital melalui pelatihan, pendampingan, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Secara keseluruhan, kerangka konseptual ini menunjukkan bahwa komunikasi pembangunan partisipatif merupakan variabel penggerak utama yang mendorong peningkatan literasi digital anggota KWT. Literasi digital kemudian memperkuat kapasitas organisasi dalam memanfaatkan media digital untuk mendukung promosi desa wisata dan pemasaran produk lokal. Proses tersebut pada akhirnya menghasilkan pemberdayaan perempuan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pengembangan Desa Wisata Brongkol yang berkelanjutan.

Implikasi Teoretis

Kerangka konseptual yang dikembangkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu komunikasi dengan mengintegrasikan empat perspektif utama, yaitu komunikasi pembangunan, literasi digital, difusi inovasi, dan kesenjangan digital. Integrasi ini memperluas kajian komunikasi pembangunan dari pendekatan konvensional menuju pendekatan berbasis transformasi digital yang menempatkan literasi digital sebagai faktor strategis dalam pemberdayaan masyarakat. Selain itu, model ini menegaskan bahwa komunikasi pembangunan tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai mekanisme untuk membangun kapasitas digital, memperkuat partisipasi perempuan, dan mendorong inovasi sosial dalam pengembangan desa wisata.

Implikasi Praktis

Bagi pemerintah daerah, pengelola desa wisata, dan perguruan tinggi, kerangka konseptual ini dapat menjadi dasar dalam merancang program pemberdayaan Kelompok Wanita Tani yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi pertanian, tetapi juga pada penguatan kompetensi digital, pemasaran digital, dan pengelolaan komunikasi berbasis media sosial. Pendekatan tersebut

diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk lokal, memperluas akses pasar, memperkuat promosi destinasi wisata, serta mendukung pembangunan desa wisata yang inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Artikel ini berhasil mengembangkan kerangka konseptual komunikasi pembangunan berbasis literasi digital sebagai strategi pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam mendukung pengembangan Desa Wisata Brongkol, Cangkringan, Sleman. Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa komunikasi pembangunan yang berorientasi pada partisipasi, dialog, dan kolaborasi menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengadopsi inovasi digital secara berkelanjutan. Integrasi komunikasi pembangunan dengan literasi digital memungkinkan anggota KWT tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu memproduksi konten digital, mengelola komunikasi pemasaran, memperluas jejaring, serta memanfaatkan media digital untuk meningkatkan daya saing produk lokal dan promosi desa wisata.

Kerangka konseptual yang dikembangkan mengintegrasikan empat perspektif teori, yaitu Teori Komunikasi Pembangunan (Servaes, 2020), Teori Difusi Inovasi (Rogers, 2003), Digital Divide Theory (van Dijk, 2020), dan Digital Literacy Global Framework (UNESCO, 2018). Integrasi tersebut menjelaskan bahwa komunikasi pembangunan berperan sebagai mekanisme pemberdayaan yang mendorong peningkatan kompetensi literasi digital melalui pelatihan, pendampingan, dan kolaborasi multipihak. Peningkatan literasi digital selanjutnya memperkuat kapasitas KWT dalam mengakses informasi, memproduksi konten digital, mengembangkan pemasaran berbasis media sosial, serta memperluas akses pasar dan promosi Desa Wisata Brongkol. Namun demikian, keberhasilan implementasi model ini tetap dipengaruhi oleh kemampuan mengatasi kesenjangan digital yang meliputi akses teknologi, keterampilan digital, intensitas pemanfaatan, dan manfaat yang diperoleh masyarakat.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian komunikasi pembangunan dengan menawarkan model konseptual yang menghubungkan komunikasi pembangunan, literasi digital, pemberdayaan perempuan, dan pengembangan desa wisata dalam satu kerangka yang terintegrasi. Model ini memperluas perspektif komunikasi pembangunan dari sekadar proses penyampaian informasi menjadi proses penguatan kapasitas digital yang mendukung pembangunan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

Secara praktis, kerangka konseptual ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah, perguruan tinggi, penyuluh pertanian, pengelola desa wisata, serta organisasi masyarakat dalam merancang program pemberdayaan digital bagi Kelompok Wanita Tani. Program tersebut perlu menekankan peningkatan kompetensi literasi digital, penguatan komunikasi pemasaran digital, produksi konten kreatif, serta pengembangan jejaring kolaboratif agar perempuan pedesaan mampu berperan lebih aktif dalam pembangunan ekonomi lokal dan pengembangan desa wisata berbasis masyarakat.

REFERENSI

- Food and Agriculture Organization. (2023). The status of women in agrifood systems. FAO.
- Jaakkola, E. (2020). Designing conceptual articles: Four approaches. *AMS Review*, 10(1–2), 18–26. <https://doi.org/10.1007/s13162-020-00161-0>
- Melkote, S. R., & Steeves, H. L. (2015). *Communication for development: Theory and practice for empowerment and social justice* (3rd ed.). Sage Publications.
- Mefalopulos, P. (2008). *Development communication sourcebook: Broadening the boundaries of communication*. World Bank.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.
- Servaes, J. (2020). *Handbook of communication for development and social change*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-981-15-2014-3>
- Tufte, T., & Mefalopulos, P. (2009). *Participatory communication: A practical guide*. World Bank.
- UNESCO. (2018). *A global framework of reference on digital literacy skills for indicator 4.4.2*. UNESCO Institute for Statistics. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265403>
- van Dijk, J. A. G. M. (2020). *The digital divide*. Polity Press.